

**PERAN YAYASAN FORUM LINTAS AGAMA (FLA) JAWA TIMUR DALAM
MENANGANI KONFLIK LINTAS AGAMA MELALUI *PEACE EDUCATION*
DI FORUM WARGA PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Tarbiyah**



Oleh :

ARIS FAKI RUDDIN AS'AD
NIM. DO3303068

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
2010**

**PERAN YAYASAN FORUM LINTAS AGAMA (FLA) JAWA TIMUR DALAM
MENANGANI KONFLIK LINTAS AGAMA MELALUI *PEACE EDUCATION*
DI FORUM WARGA PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Ilmu Tarbiyah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K T-2010 046 KI	No REG : T-2010/KI/046
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

ARIS FAKHRUDDIN AS'AD
NIM. D03303068

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Aris Fakhruddin As'ad
NIM : D03303068
Jurusan : Kependidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 29 Agustus 2010

Saya yang menyatakan

Aris Fakhruddin As'ad
NIM: D03303068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aris Fakhruddin As'ad

NIM : D03303068

Judul : Peran Yayasan Forum Lintas Agama (FLA) Jawa Timur
Dalam Menangani Konflik Lintas Agama di Forum Warga
Pacet Kabupaten Mojokerto

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Agustus 2010

Pembimbing,



Dra. Husniatus Salamah Z., M.Ag.
NIP. 196903211994032003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Sriksi oleh Aris Fakhruddin As'ad ini telah dipertahankan didepan penguji skripsi

Surabaya, 25 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Tarbiyah,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Nur Hamim, M. Ag

NIP. 196203121991031002

Ketua,

Dra. Husniyatus Salamah Zainiyati, M. Ag

NIP. 196903211994032003

Sekretaris,

M. Bahri Musthofa, M.Pd.I

NIP. 197307222005011005

Penguji I,

Drs. H. A. Hamid Syarif, MH

NIP. 195104121980031003

Penguji II,

Drs. Samsul Ma'arif, M.Pd

NIP. 196404071998031003

dan Jepang yang melakukan migrasi ke Indonesia pada jaman penjajahan \pm 60 tahun lalu. Sedangkan terjadinya migrasi antar suku/etnis di Indonesia mengakibatkan Jawa Timur memiliki komposisi penduduk antara lain suku Madura, Jawa '*Pendalungan*' yang merupakan percampuran antara suku Jawa dan Madura, Sunda dan Batak serta suku-suku lain yang sebagian besar merupakan pendatang di wilayah perkotaan.

Mojokerto merupakan salah satu daerah kabupaten di Jawa Timur, yang memiliki eskalasi konflik cukup tinggi, yaitu setingkat di bawah Situbondo, Pasuruan, Madura dan Lamongan (Bakesbang, 2003). Secara geografis, kabupaten Mojokerto merupakan dataran tinggi dengan tekstur alam yang berbukit-bukit. Dengan ketinggian rata-rata \pm 650 meter di atas permukaan laut, Mojokerto diilhami kekayaan potensi alam yang cukup berlimpah. Udara yang dingin dengan pemandangan alam yang indah menjadikan Mojokerto sebagai salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Jawa Timur. Kondisi alamnya sangat subur, sehingga lebih dari 85% penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, 6,5% sebagai pedagang, sedangkan sisanya adalah pegawai, buruh pabrik dan yang bekerja di sektor-sektor informal. Untuk kelompok yang terakhir ini adalah sebagai implikasi dari semakin berkembangnya sektor wisata di Mojokerto.

Sebagai daerah wisata dengan akses transportasi dan komunikasi yang cukup lancar dengan kota-kota besar di sekitarnya, desa Pacet mengalami peningkatan jumlah populasi pendatang setiap tahun. Hal ini seiring dengan terus

berdirinya villa-villa, hotel berbintang, pabrik dan restoran-restoran yang tumbuh dengan cepat. Lambat laun, proses perubahan struktur sosial ini, melahirkan kultur dan pola hidup baru yang akhirnya tumbuh dan hidup berdampingan dengan kultur lama. Dinamika yang terjadi di masyarakat, tidak selalu melahirkan komunikasi dan interaksi yang harmonis antar kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kegagalannya komunikasi dan interaksi sosial tersebut, seringkali menimbulkan pergesekan-pergesekan maupun ketegangan sosial. Kasus yang cukup menonjol adalah memuncaknya ketegangan hingga munculnya rencana pembakaran oknum kepala desa Pacet oleh massa pada tahun 1995, pemboman Gereja malam natal pada tahun 2003 dan aksi pelemparan gedung GKI oleh penduduk muslim di sekitarnya.

Berdasarkan hasil *assessment* di kedua desa tersebut, diketahui beberapa hal penting; *pertama*, selama ini tidak pernah tersedia wadah atau media yang bertujuan untuk melakukan dialog antara kelompok agama dan etnis bersama seluruh stakeholder komunitas. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan komunikasi dan interaksi sosial antara kelompok agama dan etnis. Tidak terciptanya ruang komunikasi dan interaksi yang efektif tersebut, akhirnya melahirkan pengkotak-kotakan yang cenderung eksklusif. *Kedua*, adalah rendahnya peran tokoh agama dan etnis dalam pengembangan nilai-nilai multikultural dan sikap toleransi pada komunitasnya masing-masing. *Ketiga*, tidak adanya komunikasi dan interaksi antara stakeholder masyarakat meliputi kelompok agama dan etnis, tokoh masyarakat, kelompok *civil society* (CSO) dan

harus ditangani, tidak hanya bersifat transisional tetapi juga transformatif, dalam berbagai level masalah, di level atas; negosiasi tingkat tinggi, membangun koalisi dan konsensus damai, pembagian kekuasaan, dan penghentian kekerasan, di level menengah; meningkatkan kapasitas perdamaian, advokasi perdamaian, resolusi konflik berbasis pemecahan masalah, pembentukan komisi perdamaian, dan di level bawah memecahkan masalah-masalah sosial-ekonomi di tingkat komunitas, trauma, prasangka, kesenjangan, ketidakadilan dan masalah-masalah sosial-ekonomi lainnya dihadapi masyarakat.

Dalam konteks itu, *Peace Education* (PE) dituntut menjawab persoalan tersebut. PE hendaknya menjawab semua permasalahan masyarakat paska konflik. Biasanya, masyarakat paska konflik manifest senantiasa mengalami konflik laten. Konflik jenis ini justru susah dideteksi, dan menjadi salah satu kekuatan kekerasan yang suatu saat meledak. Kondisi demikian, PE menjadi perlu beradaptasi dengan kebutuhan local.

Dengan melihat potensi yang ada, salah satu upaya yang perlu dikembangkan adalah industri berbasis potensi lokal. Yakni, industri yang mengandalkan bahan baku dari produk pertanian. Sehingga, selain mendapat nilai tambah ekonomis, juga pada tahap selanjutnya menjadi pondasi interaksi sosial yang rukun dan damai.

Kedua, elit atau tokoh yang terlibat sebagian besar bukan pelaku konflik. Mereka adalah tokoh pluralitas, memiliki tingkat intelektual lebih dan sangat menghargai perbedaan. Sehingga, ada kesenjangan psikologis antara masyarakat yang terlibat konflik dengan para tokoh yang mewakili. Konsekuensinya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui proses dialog sering kali mentah ketika disosialisasikan kepada masyarakat. Demikian halnya dengan formulasi konsep yang dihasilkan melalui seminar dan loka karya, seringkali menemukan hambatan dalam proses implementasinya.

Ketiga, kerja-kerja perdamaian harus diusahakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Artinya, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog dan formulasi konsep melalui seminar dan lokakarya harus berjalan sinergis dengan kerja-kerja konkrit dalam masyarakat.

Simon Filantropa (Mantan Ketua GKI Jatim) pernah melontarkan kritik dialog lintas agama yang sering diadakan oleh FLA Jatim. Menurutnya, dialog-dialog lintas agama sudah cukup. Sekarang, yang paling efektif adalah turun ke basis melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama untuk membangun budaya damai ditengah komunitas plural. Sebab, pemahaman tentang toleransi dan penerimaan atas keberadaan di tingkat tokoh telah final. Justru, yang paling membutuhkan adalah masyarakat akar rumput yang terlibat konflik dan rentan konflik.

akhirnya mereduksi pengakuan dan legitimasi para pemimpin formal seperti Kepala Desa, Camat dan bahkan Bupati. Fenomena ini akhirnya menyebabkan komunikasi dan interaksi antara *stakeholder* masyarakat sangat rendah. Akan tetapi, di pusat-pusat populasi warga pendatang (*krajan*), masyarakat menunjukkan karakteristik yang berbeda. Sebagian masyarakat telah mengalami akulturasi budaya dengan para pendatang, sehingga melahirkan budaya baru *semi-kota* yang cenderung permisif dengan hal-hal baru. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat pinggiran yang defensif dan resisten terhadap warga pendatang maupun budaya baru, sehingga cenderung eksklusif.

Secara umum masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang relatif rendah terhadap nilai-nilai toleransi dan multikultural. Tidak adanya konflik terbuka beberapa tahun terakhir bukan merupakan cermin tumbuhnya budaya toleransi, namun lebih disebabkan karena tidak adanya pemicu (*trigger off*). Ketika ada pemicu, misalnya momentum-momentum politik lokal seperti pemilihan kepala Desa, camat dll, selalu melahirkan ketegangan antar elemen masyarakat.

Kedua, Analisis Ekonomi. Sebagai daerah wisata, Desa Pacet memiliki perkembangan ekonomi yang cepat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari berkembangnya rantai ekonomi yang lain yang tumbuh seiring dengan semakin ramainya obyek-obyek wisata. Disatu sisi, tumbuhnya rantai ekonomi seperti adanya warung-warung pinggir jalan, berkembangnya jasa

transportasi ojeg, munculnya wartel-wartel dipingir jalan dan lain sebagainya adalah sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Tetapi di sisi lain, masuknya kelas sosial baru yang memiliki modal besar dan turut berkompetisi dalam bentuk investasi berupa hotel, villa, restoran dan jasa-wisata yang lain, sedikit-demi sedikit akan menggeser masyarakat lokal. Karena kelompok modal memiliki akses yang lebih baik dengan birokrasi lokal. Akumulasi dari pergeseran sosial secara ekonomi kepada masyarakat lokal oleh “kelas sosial baru” ini, akhirnya menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi, selain disebabkan oleh rendahnya SDM dalam mengelola potensi lokal di tempat tinggalnya. Pada kondisi tersebut, pemerintah Desa masih belum mampu untuk membuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat “terpinggirkan” tersebut. Lambat laun, keadaan ini akan menjadi potensi konflik yang akan meledak di waktu yang akan datang.

Pada konteks masyarakat yang demikian, program PESaja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan program development. *Matching Program* antara PE dengan development ini menjadi sangat strategis, karena keduanya akan mendorong program ke arah pencapaian goal. Dengan demikian diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Mulai tereduksinya tradisi agraris yang berganti dengan tradisi perdagangan, seiring dengan berkurangnya lahan pertanian, menuntut kesiapan masyarakat dalam hal

pengetahuan dan ketrampilan berdagang guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akhirnya dengan pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas, banyak anggota masyarakat yang usahanya gulung tikar atau berganti menjadi buruh tani yang penghasilannya jauh lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya (petani). Pada titik ini sangat relevan untuk menggali kembali nilai (*value*) kearifan lokal, agar masyarakat kembali berdaya dan mandiri tanpa tergantung dengan pihak manapun. Dengan semangat kearifan lokal tersebut diharapkan masyarakat dapat mengetahui potensi sosial, budaya dan ekonomi daerahnya, sehingga dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Analisis Politik. Sebagaimana daerah lain juga memiliki perkembangan politik yang dinamis. Tokoh agama dan etnis (*informal leader*) memiliki peran dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Sehingga arah politik lokal biasanya sangat dipengaruhi oleh keberadaan *informal leader* tersebut. Aspirasi dan partisipasi masyarakat tidak memiliki kekuatan, apalagi mempengaruhi sebuah kebijakan. Karena tereduksi oleh kepentingan sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang kuat, sehingga masyarakat hanya digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan politik belaka. Suasana politik seperti inilah yang sering menjadikan agama sebagai komoditas politik, sehingga yang nampak dipermukaan seakan-akan adalah pertentangan antar agama maupun etnis. Keadaan ini, akhirnya melahirkan sikap yang apatis dan respon masyarakat yang rendah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah lokal yang cenderung *top down*. Hal ini merupakan

pandangannya, Supoyo tidak melihat adanya konflik ditengah warganya, semua berjalan dengan baik. Roda ekonomi berputar seiring dengan kemajuan Desa Pacet dalam mengembangkan segmen pariwisata, dan produk pertaniannya. Selain itu, dalam pandangannya, dalam agama Islam telah secara tegas "*Lakum Dinukum Waliyadin*", untukmu agama-mu dan untukku agamaku. Dengan demikian, hemat Supoyo, tidak ada masalah dalam konteks hubungan sosial-keagamaan dikalangan masyarakat Pacet, apalagi hingga konflik lintas agama.

Pandangan Supoyo diatas tentu berbeda dengan perspektif E. S Pa'at, tokoh Kristen yang kritis ini ketika menilai fakta sosio-kegamaan warga Pacet. Sebagai kelompok minoritas, Pak Pa'at memiliki pandangan berbeda dengan mantan dan kepala Desa Pacet diatas. Sebaliknya, berangkat dari apa yang dia rasakan selama ini, ada cara pandang "Negatif" dilabelisasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, seperti dirinya. Dalam tataran sosiologis, sebagai penganut Kristen yang hanya menjadi petani biasa tentu mendapat perlakuan berbeda dari tetangganya yang mayoritas adalah Non Kristen.

Meskipun secara tektual Pak Pa'at tidak menyalahkan mayoritas agama lain, dari apa yang dia katakan tersirat keinginan mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama. Lebih jauh, keheranannya terhadap sosio-keagamaan dilingkungannya adalah semata-mata pengalaman pribadi yang dialami selama ini. Hematnya:

Lebih jauh, kehadiran FW ini menjadi sebuah media saling mengenal antar sesama tetangga. Pacet merupakan desa transisional menuju Kota. Satu sisi dengan kenyataan lokalitas, mereka masih tergantung pada pertanian. Sementara disisi lain, gaya hidup bersosialisasi nyaris tidak diketemukan. Oleh karena itu, terkadang diantara tetangga mereka tidak saling mengenal. Hal ini tentu sangat dirasakan oleh Maria Elizabeth, selaku Sekretaris FW Pacet. Dengan aktif di FW, selain mendapatkan ide atau pengetahuan baru dan bertukar pengalaman, dia juga dapat mengenal para tetangganya. Perlu diketahui, bahwa Maria Elizabeth merupakan pendatang di desa Pacet. Lahir di Surabaya, 8 juli 1968. Ibu Maria --- sapaan Maria Elizabeth --- adalah pendatang yang mengabdikan diri di Gereja Khatolik Pacet. Perempuan asli Tandes, Surabaya ini adalah SLTA yang sehari-harinya menjadi Biarawati.

Sebagai sebuah media komunikasi dan transformasi, FW merupakan bagian dari kerja sosial, baik ditingkat global maupun lokal. Dalam kerja advokasi, misalnya media menjadi instrument pendukung terhadap keberhasilan proses-proses legislasi-yuridiksi dan proses politik-birokrasi dalam advokasi. Bahkan, begitu penting media untuk mendukung keberhasilan kinerja kerja-kerja sosial dan kemanusiaan, muncul lembaga secara spesifik mensupport kebutuhan media bagi pengorganisir atau organisasi sosial.

Bagi Kuswarno, media semisal FW ini ternyata memiliki makna universal. Bukan hanya menjadi media *Peace education*, melainkan juga

budaya damai ini melalui program pendidikan yang diarahkan pada transformasi nilai-nilai perdamaian, baik secara universal maupun konteks lokalitas.

Jika konsep PE ini diterapkan sebagaimana yang dilakukan di Negara lain, dan juga sama halnya dengan yang UNICEF lakukan. Maka, tidak menemukan basis kontekstualisasi dengan kebutuhan lokal. Kenyataan ini merujuk pada fakta konflik yang terjadi di Pacet; adalah jenis konflik laten (*latent conflict*) yang suatu saat menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*). Sehingga, PE di Pacet menjadi berbeda dengan PE di berbagai Negara lainnya.

Kendati demikian, program PE di Pacet tidak lantas menafikan gagasan utama membangun perdamaian. Tujuan PE yang mengidealkan terciptanya masyarakat damai dengan berpijak pada nilai-nilai toleransi, multicultural, dan kearifan lokal menjadi misi utama dalam program PE ini. Kalau demikian, maka kebutuhan lokalitas Pacet mendorong perlu adanya dialog konsep PE dengan fakta yang dihadapi.

Selain berbasis kebutuhan, PE di Pacet ini lebih menitik beratkan pada inovasi berbasis nilai yang tanpa mereduksi nilai perdamaian yang sesungguhnya ingin disampaikan. Sehingga, program semisal budidaya potensi lokal disana dimuati dengan proses PE. Jika demikian, maka PE di Pacet merupakan sesuatu yang memiliki keunikan tersendiri.

melekat. Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan fenomena transformasi konflik tersebut, antara lain; *Pertama*, kegagalan sejarah dalam menyelesaikan konflik. Artinya, eskalasi konflik yang tinggi waktu itu telah menyebabkan banyak pihak terluka baik secara fisik maupun psikologis. Ketika konflik terbuka tidak diimbangi dengan kesadaran komunitas atau pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya, maka konflik akan berhenti seperti layaknya kobaran api yang akhirnya pada tetapi masih menyimpan titik api. Titik api tersebut akan tetap tertutup abu dan puing-puing, kelihatannya lengang dan damai, ketika ada tiupan angin yang mengubarkan titik api tersebut menjadi kobaran api.

Kegagalan sejarah untuk menyelesaikan konflik itulah yang menyebabkan tersisanya bara api seperti halnya konflik masa lalu Pacet yang mewariskan trauma dan kebencian hingga sekarang. Ketiadaan penyelesaian konflik itulah yang menyebabkan tuduhan-tuduhan, kebencian-kebencian tidak memperoleh jawaban, sehingga akan terus tumbuh dan tertransformasi dari generasi ke generasi. *Kedua*, adanya streatipe atau primordialisme agama dan kelompok yang kuat. Artinya, komunitas yang sebenarnya bukan merupakan bukan bagian dari konflik masa lalu, tetapi merasakan ketersinggungan dan kebencian sebagaimana halnya pelaku konflik, karena didorong oleh kesamaan agama, etnik maupun kelompok. Sehingga komunitas hari ini, akhirnya menjadi pewaris konflik masa lalu yang menyimpan potensi konflik terbuka di kelak kemudian hari.

Fenomena yang tampak dipermukaan, komunitas pasca konflik ini senantiasa menampilkan kondisi yang normal sebagai masyarakat yang lain. Hal ini didukung oleh keengganannya komunitas untuk terbuka dan membahas kembali persoalan tersebut kepada pihak lain. Kenyataan inilah yang tersembunyi dan sebenarnya menyimpan bara api konflik yang sangat besar. Akhirnya, pada konteks inilah program PE menjadi sangat relevan bekerja pada masyarakat pasca konflik.

Berpijak pada kenyataan sejarah dan sosiologi komunitas itulah maka diperlukan pendekatan yang tepat, agar misi perdamaian dapat disampaikan. Pendekatan secara tekstual formalistik yang secara terang-terangan menawarkan perdamaian, jelas akan menuai banyak kegagalan. Pendekatan ini justru tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan dan kebingungan warga, karena secara kasat mata dilingkungan komunitas tidak sedang terjadi konflik. Lambat laun warga akan menjadi curiga dan bahkan resah dengan masuknya program PE.

Oleh karena itu, PE ini tidak serta merta masuk begitu saja, melainkan membutuhkan proses panjang. Salah satu agenda utama adalah membentuk komunitas, berdasarkan kesepakatan warga dan FLA Jatim menjadi fasilitatornya akhirnya Forum Warga (FW) menjadi nama bagi komunitas ini.

Berpijak dari komunitas inilah, program PE memasuki target operasinya. Secara pelan tapi pasti, PE menjadikan mereka sebagai komunitas yang berdaya, kritis dan independen. Selain itu, wadah ini menjadi sarana

didapatkan dari data sejarah konflik yang pernah terjadi pada masa lalu, ketegangan-ketegangan yang sedang terjadi, sikap elit lokal dan masyarakat secara individu dalam menghadapi ketegangan, dll. Data-data yang diperoleh pada langkah pertama ini dianalisis dan ditarik kesimpulan berdasarkan konsep peacebuilding. Tahapan ini juga digunakan untuk menilai kemungkinan diseminasi budaya damai.

Kedua, mengamati secara detail kondisi obyektif di tingkat lokal. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi masyarakat dalam berbagai aspeknya, kearifan-kearifan lokal yang masing-masih dipegang, permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama, dan potensi-potensi wilayah.

Ketiga, inisiasi pendampingan melalui forum-forum pertemuan warga. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menggali informasi dari peserta yang terdiri berbagai latar belakang keyakinan dan mensosialisasikan pentingnya budaya damai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama. Selain itu, agenda pertemuan dilanjutkan dengan membentuk forum warga ketika dijumpai kesamaan tujuan dan keinginan dari peserta pertemuan. Forum warga menjadi media alternative bagi masyarakat warga yang plural untuk membuka ruang-ruang dialog dan komunikasi.

Keempat, penguatan forum warga. PE berbasis komunitas mengidealkan masyarakat yang tergabung dalam forum warga menjadi pilar-pilar perdamaian ditingkat lokal. Harapan ini meniscayakan adanya

penguatan-penguatan forum warga secara kelembagaan, meliputi pembuatan aturan main dan mekanisme kelembagaan (*institutional building*), penguatan sumber daya manusia pengelola forum warga (*capacity building*) dan pembuatan program kerja forum warga.

Kelima, implementasi program kerja forum warga. Forum warga Pacet melakukan uji coba pengulahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos dan uji coba pertanian organik bawang merah. Proses implementasi program kerja ini dilakukan secara bersama-sama oleh anggota forum warga dan melibatkan stakeholder. Proses ini juga meniscayakan terbangunnya dialog dan komunikasi inten atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan.

Keenam, tranformasi media kampanye kontekstual. Tujuan media kampanye kontekstual untuk mensosialisasikan forum warga secara kelembagaan dan program-program kerja yang telah dilakukan dalam bingkai kebersamaan. Pada tahap selanjutnya, pemahaman warga secara luas tentang eksistensi forum warga melalui media kampanye, dapat memunculkan mobilisasi dan massifikasi dari masyarakat.

Enam tahapan di atas yang telah dilakukan FLA Jatim dalam usaha menumbuhkan budaya damai di tingkat lokal melalui PE berbasis komunitas. Keseluruhan proses tersebut dilalui dalam kurun waktu dua tahun. Proses panjang berdasarkan tahapan-tahapan yang terencana dan menggunakan pendekatan Kebutuhan masyarakat tersebut merupakan target antara (target penyampai) untuk menumbuhkan kesadaran warga. Kesadaran warga akan

Artinya, kerangka konseptual hendaknya dikontekstualisasi berdasarkan kebutuhan lokalitas. **Kedua**, sebagai sebuah terminology pendidikan non formal, PE hendaknya melibatkan para *stakeholder*, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda. PE bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan actor konflik, melainkan menjadi saran transformasi nilai-nilai universal perdamaian. **Ketiga**, Pemerintah hendaknya melakukan fasilitasi, atau desiminasi nilai-nilai pluralism dan multikulturalisme (perdamaian) dalam pendidikan formal. Fakta, bahwa bangsa Indonesia adalah berpondasi sebuah keragaman agama, etnis, bahasa dan budaya. Sebab, kemajemukan tidak selamanya menjamin keharmonisan, melainkan juga berpotensi menjadi pemecah integrasi bangsa. Sehingga, perlu adanya desiminasi nilai-nilai toleransi sejak dini.

- Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Bertindak*, (Jakarta: British Council, 2001)
- Fountain, Susan, *Peace Education In UNICEF; Working Paper Education Section Programme Division*, (New York: UNICEF, 1999)
- Freire, Paulo, *Pendidikan Masyarakat Kota* (terj) (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- , dkk. *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*, (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Gavriel, Nevo, Baruch, 2002, *Peace Education: The Concept, Principles and Practices Around the World*, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, [http://www.peaceed.org/ what/whatgs.htm](http://www.peaceed.org/what/whatgs.htm)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Huntington, Samuel P, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, (New York: Simon and Schuster, 1996)
- Jacques Hallak, *Globalization, Human Rights and Education*, (Paris: UNESCO; International Institute for Educational Planning, 1999)
- Khaled Aboe el-Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Ctoriter Ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004)
- Kimball, Charles, *When Religion Becomes Evil*, (harperCollins - eBooks, 2008)
- Linda Low, "Implications of Globalization for Proverty Reduction Efforts in Asia and the Pasific", paper is presented at the *Asia and Pasific Forum on Proverty: Reforming Policies and Institutions for Proverty Reduction, Manila, Asian Development Bank* (2001)
- Ruang Publik Agama*, dalam Jurnal Gerbang No. 13. Vol. V Oktober 2002 – Januari 2003,
- Makalah diseminarkan dalam acara bedah buku karya Fathi Osman yang berjudul "Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan" kerjasama Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) UMM dengan Pusat Studi Islam dan

